

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Perjanjian Kinerja dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparan dan kinerja aparatur seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan pada dokumen perencanaan yang terkait dengan rencana strategis daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Demikian akhirnya Perjanjian Kinerja Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malinau, 1 Februari 2023

The official seal of the Bupati of Malinau, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'BUPATI MALINAU' and a star. A blue ink signature is written over the seal.
BUPATI MALINAU
WEMPI W. MAWA, SE., M.H



BUPATI MALINAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WEMPI W. MAWA, SE., M.H

Jabatan : BUPATI MALINAU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malinau, 1 Februari 2023

BUPATI MALINAU



WEMPI W. MAWA, SE., M.H

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,05
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,67
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah)	10.300,00
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas (%)	0.55
		Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,4
5	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	84,36
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	80,6
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	79,5
7	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	4,9
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,70
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,84
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas (%)	72
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil (%)	73,30
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	75,09
11	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,10
12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	91.100.000.000

13	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	52,10
		Pesentase Pemukiman Yang Layak (%)	79
		Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	1:1,071
		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	70
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	72
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	30,34
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	97,25
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,75
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,36
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	67,10
		Nilai LPPD	2.950
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN	Opini BPK	WTP
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	5,5
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	85
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	15,59

	PROGRAM		ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	53.074.020.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	408.179.300
	Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	338.918.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	506.695.000
	Program pengendalian Penduduk	Rp	163.200.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	1.519.280.000
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	1.046.700.000
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat		
	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	127.931.893.117
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	16.681.000.000
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	899.919.750
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	199.777.000
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana		
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	954.999.100
	Program Penanggulangan Bencana	Rp	479.600.000
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	50.000.000

5	Meningkatnya Kesetaraan Gender		
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	75.000.000
	Program Perlindungan Perempuan	Rp	309.148.000
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	230.000.000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	200.000.000
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat		
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	11.300.000.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp	300.000.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	1.099.998.800
7	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	4.347.911.400
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	3.652.276.220
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.272.264.900
	Program Penyuluh Pertanian	Rp	1.349.999.647
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	150.000.000
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	200.000.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	525.000.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1.545.000.000

8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Wilayah		
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	3.005.084.927
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	2.495.503.426
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	9.101.106.286
	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	539.995.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	620.248.000
	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	3.993.455.381
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	149.999.900
	Program Pembinaan Sejarah	Rp	149.999.660
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	2.467.200.000
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas		
	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Rp	418.370.000
	program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	791.000.000
	Program Pengembangan UMKM	Rp	2.775.150.000
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	437.028.372
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	75.000.000
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	50.780.000
11	Menurunnya Angka Pengangguran		
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1.300.000.000

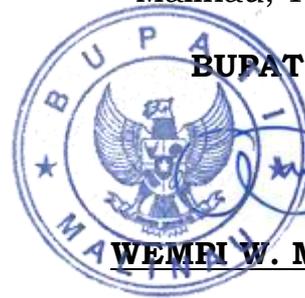
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	210.482.000
	Program Hubungan Industrial	Rp	720.000.000
	Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Rp	100.000.000
12	Meningkatnya Investasi daerah		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	417.400.000
13	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		
	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	117.578.962.999
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp	5.522.862.619
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	159.642.237
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	25.099.929.152
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	25.703.278.257
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	1.549.987.600
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	62.580.187.107
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	1.724.952.282
	Program Pengembangan Permukiman	Rp	55.140.866.148
	Program Pengembangan Perumahan	Rp	250.000.000
	Program Kawasan Permukiman	Rp	3.200.000.000
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah		
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	80.000.000
	Program Aplikasi Informatika	Rp	2.450.000.035

15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara		
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	10.573.113.310
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	499.990.500
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	4.805.347.800
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	2.560.000.000
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.170.000.000
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	250.000.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	2.201.751.800
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.040.075.000
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	2.399.881.239
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	373.021.833.789
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.020.441.500
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.037.585.726

**20 Meningkatkan Penyelenggaraan
Pembangunan Berbasis Desa**

Program Penataan Desa	Rp	200.000.000
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	3.899.999.000

Malinau, 1 Februari 2023



BUPATI MALINAU

WEMPI W. MAWA, SE., M.H